

DEBAT CALON PRESIDEN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019

25

Ahmad Budiman

Abstrak

Debat calon presiden (capres) tahap pertama telah dilaksanakan dengan berbagai catatan penting yang intinya menekankan kegiatan debat capres belum efektif. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan setelah debat dan dari tanggapan netizen. Secara normatif, kegiatan debat capres sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu tahun 2019, terutama pemilihan presiden (Pilpres). Tulisan ini mengkaji tentang efektivitas debat capres dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih pada Pilpres tahun 2019. Debat capres memiliki pengaruh terhadap pengetahuan dan sikap politik masyarakat, sehingga bila dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilpres tahun 2019. Untuk itu KPU dan pasangan capres perlu terus meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian pesan, agar debat capres berikutnya dapat berlangsung lebih efektif. DPR melalui fungsi pengawasan dapat meningkatkan pengawasan untuk melihat efektivitas pelaksanaan debat dalam rangka peningkatan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

Pendahuluan

Pelaksanaan debat calon presiden (capres) pertama sebagai bagian dari kegiatan Pemilu 2019 telah dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019, yang mengambil tema hukum, korupsi, terorisme, dan hak asasi manusia. Debat ini disiarkan secara langsung oleh lembaga televisi nasional, radio, dan *streaming* di berbagai platform media sosial.

Satu hari setelah penyelenggaraan debat capres, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melakukan

survei selama sepekan (18-25 Januari 2019) di 34 provinsi dan melibatkan 1.200 responden. Hasilnya, hanya 50,6% responden yang menonton acara debat di televisi. Setelah menyaksikan debat capres, hanya 5,6% responden yang mengatakan mengubah pilihan calon presiden dan 82% mengatakan tidak akan mengubah pilihannya.

Berdasarkan survei bulan Desember 2018, ada 15% massa *undecided voters* atau yang belum menentukan pilihannya, namun setelah menyaksikan acara debat



jumlah massa ini menurun tipis menjadi 14,2%. Sedangkan elektabilitas kedua pasangan capres hanya naik sedikit, dari 54,2% menjadi 54,8% untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan dari 30,6% menjadi 31% untuk pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Koran Tempo, 31 Januari 2019).

Beberapa pihak menilai pelaksanaan debat pertama tidak efektif. Direktur SMRC, Sirajudin Abbas, menilai ada beberapa sebab masyarakat kurang tertarik dalam penyelenggaraan debat seperti isu debat. Empat isu yang dipilih memang penting, namun tidak menjadi prioritas utama kebutuhan masyarakat. Selain itu perdebatan yang dimunculkan kedua capres tidak menarik untuk didengar dan disaksikan masyarakat. Pengamat komunikasi politik, Silvanus Alvin, mengusulkan agar debat menarik maka perlu ditambah waktu untuk debat yang diisi oleh sindiran-sindiran politik sehingga akan terlihat kandidat mana yang paling siap dalam menghadapi sindiran tersebut (Suara Pembaruan, 1 Februari 2019). Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, menjelaskan akan membuka ruang debat bebas antara capres pada segmen keempat. Hal ini agar debat lebih mengeksplorasi gagasan masing-masing capres (Suara Pembaruan, 1 Februari 2019). Tulisan ini akan menganalisis efektivitas debat capres dan peningkatan partisipasi pemilih Pilpres tahun 2019.

Peningkatan Partisipasi Pemilih melalui Debat Capres

Pelaksanaan Pemilu 2019 akan dilaksanakan secara serentak

yaitu pemilu legislatif (Pileg), bersamaan dengan Pilpres, berbeda dengan pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya yang membedakan waktu pelaksanaan antara Pileg dengan Pilpres. Keberhasilan pelaksanaan pemilu serentak, salah satunya ditentukan dengan tingginya angka partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Komisioner KPU, Viryan Azis mengungkapkan, total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2) sejumlah 192.828.520 orang yang terdiri dari 96.271.476 laki-laki dan 96.557.044 perempuan (idntimes.com, 6 Februari 2019). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri mencatat pemilih pemula pada Pemilu 2019 berjumlah 5.035.887 orang pemilih. Hal ini dilihat dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) usia pemilih yang telah menginjak 17 tahun pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 17 April 2019 (detik.com, 6 Februari 2019). KPU menetapkan target partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 sebesar 77,5% (Koran Tempo, 31 Januari 2019, hal. 5).

Kegiatan debat capres dan partisipasi pemilih, hakekatnya merupakan kegiatan politik. Kegiatan politik menurut Gabriel A. Almond, memiliki dua kategori fungsi yaitu fungsi masukan (*input function*) dan fungsi keluaran (*output function*). Fungsi masukan (*input function*) adalah: "fungsi yang sangat penting dalam menentukan cara kerjanya sistem dan yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan dalam sistem politik. Fungsi keluaran terkait dengan dampak yang dihasilkannya (Moechtar

Mas'ood, 1982:29). Partisipasi politik merupakan fungsi keluaran dari kegiatan politik.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Ramlan Surbakti yang menjelaskan, kadar tinggi rendahnya partisipasi politik warga negara disebabkan oleh faktor kesadaran politik seseorang tentang hak dan kewajibannya kepada negara dan kepercayaannya kepada pemerintah. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan politik, minat dan sikap politik dinegaranya yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah. (Ramlan Surbakti, 1992:144).

Potensi untuk terbentuknya pengetahuan politik, minat dan sikap politik setiap orang setelah menyaksikan debat capres Pemilu 2019, dapat semakin memperkuat urgensi kegiatan debat capres yang diarahkan sebagai salah satu metode dalam terminologi sosiologi politik. Hal ini sebagaimana dikemukakan John W. Ellswort dan Arthur A. Stahnke yang mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses kesadaran politik sejak kecil hingga dewasa, yaitu bagaimana seseorang belajar nilai-nilai dan sikap sosial yang memengaruhi kehidupan politik (Hendry Subiakto, 2012:57).

Kegiatan debat capres Pemilu 2019 sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat baik KPU sebagai penyelenggara debat, materi debat, pasangan capres, panelis maupun media yang menyiarkan acara debat, merupakan satu kesatuan komponen pembelajaran nilai-nilai dan sikap sosial yang memengaruhi kehidupan politik. Untuk itu pelaksanaan debat capres Pemilu 2019 pada tahap-tahap berikutnya, mutlak untuk lebih ditingkatkan, agar keinginan untuk menjadikannya

sebagai wadah pembelajaran nilai dan sikap sosial yang memengaruhi kehidupan politik akan benar-benar terwujud.

Upaya Peningkatan Kualitas Debat

Upaya peningkatan kualitas debat capres perlu dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara debat, moderator debat, paslon capres, dan media massa. **Pertama**, KPU memiliki tanggungjawab yang besar dalam rangka pembentukan nilai dan sikap politik masyarakat, terutama terkait dengan pemilihan materi debat setiap tahapannya. KPU juga memiliki tanggungjawab untuk memutakhirkan cara penyajian materi setiap tahapan debat capres. Belajar dari pengalaman debat tahap pertama, materi yang mengambil tema hukum, korupsi, terorisme, dan hak asasi manusia, sebetulnya sangat diharapkan memberikan jawaban jawaban masyarakat atas permasalahan tersebut.

Pada debat tahap berikutnya, KPU perlu mempersiapkan materi debat yang permasalahannya berangkat dari permasalahan berskala nasional dan permasalahan berskala lokal. Hal ini dimaksudkan, agar masyarakat dapat secara cermat memahami kemampuan pasangan calon dalam mengatasi permasalahan berskala nasional dan berskala lokal. Sehingga kemungkinan dari pasangan capres hanya menyajikan narasi normatif atas persoalan yang diajukan, seperti pada debat pertama, tidak akan terulang lagi. KPU tidak perlu lagi menyampaikan kisi-kisi permasalahan kepada pasangan

calon, tapi cukup menyebutkan tema besar dari debat tahap kedua.

Kedua, moderator. KPU juga perlu lebih cermat dalam memilih kemampuan moderator dalam debat tahap berikutnya. Pilihan untuk menjadi moderator juga harus didasari pada kemampuannya dalam memahami permasalahan yang dijadikan tema debat tahap kedua. Moderator tidak hanya mampu mengendalikan massa diruang debat, mengendalikan waktu debat dan dikenal banyak orang, namun juga harus memiliki kompetensi akan bidang masalah yang akan didebatkan. Kemampuan moderator dalam mengatur debat, ditandai dari kemampuannya terhadap bidang masalah yang diperdebatkan, kemampuan untuk memfokuskan atau memperdalam materi debat yang disajikan oleh pasangan calon.

Ketiga, paslon capres. Pasangan capres sebagai komunikator politik tentunya memiliki motif komunikasi atas seluruh materi yang disiapkan dan disampaikan dalam acara debat. Pada motif komunikasi itu juga pasti termuat target substansi dan target komunikasi mana yang ingin disasanya. Untuk itu, kekuatan tampak belakang capres dalam menyusun, memprioritaskan materi, pertanyaan dan sanggahan dalam debat, justru harus dikemukakan ke depan, menjadi kekuatan strategi tampak depan yang bertujuan memenangkan persaingan dalam debat. Kekuatan isi pesannya justru harus ditekankan kepada kemampuan untuk “menjatuhkan” lawan debat, mempertahankan kekuatan konstituen debat, sekaligus juga mampu merebut konstituen yang dimiliki lawan

debat. Materi debat yang disajikan, ukuran keberhasilannya harus dilihat dari seberapa banyak konstituen capres lawan beralih menjadi konstituennya dan memilihnya pada hari pelaksanaan pencoblosan. Materi yang disusun dan disampaikan pasangan capres, justru harus semakin dekat dengan kebutuhan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Keinginan paslon untuk meningkatkan partisipasi pemilih setelah menyaksikan debat tidak akan pernah terwujud, bila materinya hanya bersifat normatif saja. Masyarakat melalui kegiatan debat capres ini, justru lebih ingin mengetahui kemampuan pasangan capres dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, apalagi jika permasalahan itu dekat dengan kebutuhan dan realita di masyarakat.

Keempat, media massa. Pilihan penggunaan media juga menjadi hal yang harus benar-benar diperhatikan KPU, agar pelaksanaan debat capres tahap berikutnya dapat berjalan secara efektif sehingga mampu membentuk pengetahuan dan sikap politik masyarakat. Pilihan penggunaan media harus diarahkan pada media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dan atau pancarannya mampu diterima diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penggunaan media sosial justru harus lebih ditingkatkan, agar maksud dari kegiatan debat ini untuk menggugah partisipasi pemilih pemula Pemilu 2019 akan dapat tercapai. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu melakukan

pengawasan intensif, terutama bila ditemukan kegiatan atau materi debat capres melalui media televisi, terindikasi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Pelaksanaan debat capres tahun 2019, juga harus diawasi efektivitas pelaksanaannya oleh DPR RI. DPR RI melalui Komisi II DPR RI dapat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan KPU dan Bawaslu untuk melihat efektivitas acara debat capres dan pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih. Komisi II perlu mengetahui langkah-langkah yang dilakukan KPU untuk debat capres pada tahapan berikutnya. Terkait dengan penggunaan media penyiaran, maka Komisi I DPR RI perlu melakukan rapat dengar pendapat dengan KPI untuk melihat efektivitas penyajian acara debat dan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas P3SPS.

Penutup

Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 dilakukan dengan menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dengan pemilu presiden dalam satu hari pelaksanaan pemilu. Salah satu kegiatan yang dilakukan KPU terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019 yaitu debat capres Pemilu 2019. Ada lima tahapan pelaksanaan debat capres yang masing-masing tahapannya mengusung tema debat sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kenyataannya, banyak kalangan menyatakan debat capres tahap pertama, banyak kalangan menyatakan kegiatan tersebut kurang efektif.

Pelaksanaan debat capres memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi pemilih Pemilu 2019. Tingkatan partisipasi pemilih kali

ini berlaku untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif, mengingat pelaksanaan pemilu serentak Pemilu 2019 dilakukan bersamaan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif. Untuk itu pelaksanaan debat capres Pemilu 2019 menjadi sangat penting dikelola dengan baik, agar tingkat partisipasi pemilih menjadi lebih meningkat. Komunikator politik, baik KPU dan pasangan capres memiliki tanggungjawab dalam mengefektifkan persiapan acara, penyusunan materi dan penyajian pesan debat yang akan disiarkan melalui media massa. Pasangan capres harus dapat meyakinkan masyarakat yang belum memiliki pilihan, konstituennya, dan merebut konstituen pasangan lawannya.

KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu melakukan berbagai persiapan acara yang matang, termasuk dengan menghadirkan peraturan KPU yang secara khusus membahas soal debat capres pada pelaksanaan pemilu. Dan mengingat acara debat ini disiarkan melalui media penyiaran, maka KPU bersama KPI perlu menghasilkan regulasi bersama yang dapat memberikan aturan normatif bagi kedua lembaga ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. DPR melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu melakukan evaluasi secara intensif terkait dengan regulasi yang digunakan oleh KPU dalam pelaksanaan acara ini, dan melihat efektivitas pelaksanaan debat dalam rangka peningkatan angka partisipasi pemilih Pemilu 2019, serta melihat efektivitas penggunaan media penyiaran yang digunakan dalam acara debat capres tahun 2019.

Referensi

"Ada 5 Juta Pemilih Pemula di Pemilu 2019", <https://news.detik.com/berita/4215354/ada-5-juta-pemilih-pemula-di-pemilu-2019>, dipublikasi 17 September 2018, diakses 6 Februari 2019.

"Debat Tidak Efektif", *Suara Pembaruan* 1 Februari 2019, hal. 2-3.

Hendry Subiakto dan Rachmah Ida, 2012, *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

"KPU: Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 adalah 192 Juta

Jiwa", <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/kpu-rilis-jumlah-dpt-pemilu/full>, diakses 6 Februari 2019.

Moechtar Mas'oeed dan C. Andrew, 1982, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit Grasindo.

"Survei: Pengaruh Debat Calon Presiden Kecil", *Koran Tempo* 31 Januari 2019, hal 15.



Ahmad Budiman
ahmad.budiman@dpr.go.id

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 bidang Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (ISIP) Jakarta pada tahun 1993 dan pendidikan S2 bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka(2004). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang kepakaran Komunikasi Politik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik" (2011), "Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan" (2014), dan "Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI" (2015). Nasional" Tahun 2016.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.